



Membangun Infrastruktur Berbasis Wilayah

YOGYA, TRIBUN - Infrastruktur berbasis wilayah merupakan strategi penting dalam membangun Kota Yogyakarta yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, Kota Yogyakarta dapat mewujudkan visinya sebagai kota yang ramah lingkungan, inklusif, dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Ririk Banowati menjelaskan, infrastruktur dalam pembangunan kota tak hanya sebatas hal fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial.

Dicontohkannya, infrastruktur fisik meliputi jaringan transportasi termasuk jalan raya, jembatan, jalur kereta api, bandara, dan terminal. Infrastruktur transportasi yang memadai akan memperlancar mobilitas orang dan barang, meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan mendukung sektor pariwisata Yogyakarta.

Selain itu, infrastruktur fisik termasuk fasilitas publik, meliputi sekolah, rumah sakit, puskesmas, pasar, dan ruang terbuka

hijau (RTH). Fasilitas publik yang memadai akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung aktivitas sosial dan ekonomi.

"Nah, anggaran infrastruktur ini tak hanya ada di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta, yang jadi mitra Komisi C ada juga dinas lain misal DLH Kota Yoga berkaitan pembangunan TPS 3R Karangmiri dan Kranon. Walaupun anggarannya dari Danais, yang membangun itu saat DLH," papar Ririk Banowati.

Obrolan Tugu DPRD Kota Yogyakarta, bertema 'Infrastruktur Berbasis Wilayah' di Perempatan Tugu Jogja, Sabtu (25/5).

Dijelaskan Ririk, proyek strategis pada 2024, di antaranya melakukan perbaikan atau rehabilitasi bangunan empat kantor kelurahan Kiltren, Suryatmajan, Bausaran dan Tahunan, yang bertujuan untuk mendukung peningkatan pelayanan masyarakat di wilayah.

"Kami mendorong pembangunan 4 kantor katurahan, hapusnya ada 5 tapi karena anggaran terbatas sehingga dicari mana yang

prioritas," ujarnya.

Selain itu, akan dikerjakan perbaikan fasilitas pendidikan satu di antaranya di SD Widoro Tegal Panggung, dan juga SMPN 10 Yogyakarta dengan pagu anggaran mencapai Rp4 miliar.

Anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Seno Basoro menambahkan, infrastruktur merupakan tulang punggung bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Akses yang memadai terhadap infrastruktur berkualitas menjadi kunci untuk membuka peluang, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bambang Seno menambahkan, bahwa 10 program strategis pembangunan Kota Yogyakarta telah ditetapkan untuk 2024. Program-program ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan Yogyakarta yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Di antara program strategis tersebut, yakni pembangunan Grha Budaya Taman Budaya Embung Giwangan Tahap II yang bertujuan untuk meningkatkan sarana

prasarana kebudayaan dan edukasi, kemudian pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral RSUD Kota Yogyakarta, pembangunan Gedung Puskesmas, Pakualaman dan Kraton, serta penataan permukiman kumuh Kelurahan Terban.

"Di bidang ekonomi, Pasar Terban sebentar lagi akan menjadi pasar premium, yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Diharapkan, wilayah Terban pun ekonominya dapat meningkat," ujarnya.

Sementara Kabid IPW Bappeda Kota Yogyakarta, Siti Nursanti Iriani mengatakan, satu di antara poin penting Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang baru disahkan pada 2021, adalah *mandatory spending* atau belanja wajib untuk infrastruktur sebesar minimal 40 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Nah ini memang harus kita dorong anggaran belanja infrastruktur, karena di HKPD itu minimal 40 persen sedangkan konsumsi kita itu baru sekitar 20-26 persen



ASPIRASI - Obrolan Tugu DPRD Kota Yogyakarta bertema "Infrastruktur Berbasis Wilayah" di Perempatan Tugu Jogja, Sabtu (25/5).

mungkin," ujarnya.

Terkait revitalisasi Pasar Terban, Siti Nursanti menilai perlu untuk dilakukan, mengingat lokasi pasar tersebut sangatlah premium dan dekat dengan bisnis district maupun kawasan kampus.

"Tapi yang kita tahu, kondisi pasarnya bertolak belakang dengan lokasinya. Sehingga sejak 2023, kami mendapatkan anggaran pusat untuk revitalisasi, kare-

na itu butuh anggaran yang besar sekali," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang memadai dan berkualitas membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Kota Yogyakarta dapat mencapai visi sebagai kota yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. **(han/ord)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005